PEMERINTAH
KABUPATEN
TAPIN

BerAKHLAK #bangga melayani bangsa

PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2025

LAMPIRAN 1
PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Tapin

Dinas Komunikasi Dan Informatika

Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru RT.01

Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara

Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

E-mail: *kominfotapin@gmail.com*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

Dengan adanya Dokumen Perubahan Rencana Kerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan pelaksanaan Program dan Kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dapat berjalan sesuai dengan harapan serta dapat memenuhi Indikator target yang tertuang dalam RPJMD 2025 – 2029.

Kami menyadari bahwa pembuatan Dokumen Perubahan Renja ini masih belum sempurna, tetapi yang tersaji di dalam buku ini kami anggap sudah dapat memberikan gambaran tentang kegiatan-kegiatan yang terencana, sehingga mampu mewujudkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin.

Kami juga mohon maaf jika sekiranya dalam penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 ini masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu atas kritik dan saran dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih.

Besar harapan kami, usul dan saran perbaikan atas Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025.

Rantau, Juni 2025

Kepala
Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-5
1.4 Sistematika Penulisan I-6
BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD II-11
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD II-25
2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD II-28
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah III-2
3.3 Program dan Kegiatan III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH IV-1
BAB V PENUTUP V-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2-1 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024 ..... II-4
Tabel 2-2 Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin II-5
Tabel 2-3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin II-12
Tabel 2-4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika II-14
Tabel 2-5 Kinerja Mikro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika II-15
Tabel 2-6 Data Jumlah Menara BTS Swasta Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin II-16
Tabel 2-7 Kinerja Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik II-21
Tabel 2-8 Kinerja Mikro Penyelenggaran Daerah Urusan Statistik II-22
Tabel 2-9 Kinerja Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian II-23
Tabel 2-10 Kinerja Mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian II-24
Tabel 2-11 Sumber Daya Dan Sarana/Prasarana Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024 ..... II-26
Tabel 2-12 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin II-28
Tabel 3-1 Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika III-3
Tabel 3-2 Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika III-5
Tabel 3-3 Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskominfo III-7
Tabel 4-1 Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2025 ..... IV-2

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024 ... II-14
Grafik 2.2 Provider Operator Selular II-17
Grafik 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024 .... II-21
Grafik 2.4 Kinerja Urusan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2020-2024 ..... II-24

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (Perubahan Renja SKPD), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tertuang di naskah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renja SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renja SKPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra-SKPD dan mengacu kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD/gabungan SKPD dan musrenbang untuk dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 disusun dengan disinkronisasikan dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Tapin Tahun 2025. Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Renja SKPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan renja SKPD.

Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja,

serta penyiapan data dan informasi. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja SKPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana Kerja Urusan Kominfo TA 2025 ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dengan menggunakan dana APBD.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu pada beberapa produk perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, dengan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6987;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Numenklatur Perangkat Daerah bidang Komunikasi dan Informatika;
18. Kepmendagri 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikaasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045; (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 04);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 – 2043; (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 09);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2024 Nomor 13);
27. Peraturan Bupati Tapin Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026. (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2023 Nomor 10);
28. Peraturan Bupati Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2024 Nomor 09);

29. Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025 Nomor 17);
30. Surat Edaran Bupati Tapin Nomor: 000.7.2/102- Randal/Bappelitbang/2025 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin. sehingga Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dapat dijadikan landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS Tahun 2025 dalam rangka menyusun Perubahan APBD Kabupaten Tapin Tahun 2025.

B. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025;
2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional;
3. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
4. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Tapin terdiri dari :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Perubahan RKPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD yang ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Setelah serangkaian pembahasan bersama TAPD dan DPRD Kabupaten Tapin rencana Anggaran Tahun 2025 disahkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Tanggal 30 Desember 2024 atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 30 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, DPA Dinas Komunikasi dan Informatika dengan anggaran sebesar Rp. 20.305.941.482,- untuk membiayai 5 Program dan 11 kegiatan, dan 35 Subkegiatan. 1 Program kegiatan pendukung, 4 Program kegiatan sasaran.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024 yang bersumber dari APBD terdiri dari :

Belanja Langsung Pendukung ;

1. Program Aplikasi Informatika
   a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
      - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
      - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah.
   b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
      - Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
      - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik;
      - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota cerdas;
      - Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah;
      - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE.

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Monitoring Opini dan Aspirasi Publik;
      - Pengelolaan Media Komunikasi;
      - Pelayanan Informasi Publik;
      - Layanan Hubungan Media;
      - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik;
      - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat Media dan Kemitraan Komunitas.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.
      - Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
      - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Daerah Kabupaten /Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
      - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan 2025 Urusan Kominfo, Statistik, dan Persandian

1. Program Aplikasi Informatika
   a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
      - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa.
   b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
      - Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
      - Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE

- Pengembangan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
- Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah;
- Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo;
- Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas;

2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
   a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
      - Relasi Media;
      - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat;
      - Pelayanan Informasi Publik;
      - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik;
      - Pengelolaan Media Komunikasi Publik;
      - Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
   a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
      - Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral;
      - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral;
      - Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.
   a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota
      - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;
      - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
   b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
      - Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Tabel 2-1
Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Realisasi Fisik (%)
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6
Belanja Langsung Pendukung					
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota**	**7.662.471.631**	**6.936.129.789**	**90,52**	**101**
	Perencanaan, Penganggaraan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.600.000	18.260.400	98,17	100
	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	3.463.561.115	3.328.284.436	96,09	100
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.115.225.294	1.842.024.296	87,08	100
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.134.939.288	1.068.537.000	94,15	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	538.929.464	446.265.712	82,81	100
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerahi	391.216.470	232.757.945	59,50	89
Belanja Langsung Capaian Sasaran					
2	**Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**	**2.351.256.696**	**2.210.892.230**	**94,03**	**86,16**
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.351.256.696	2.210.892.230	94,03	96,76
3	**Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**	**9.208.645.023**	**8.653.751.048**	**93,97**	**101**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.228.973.817	3.170.112	98,18	100
	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.979.671.206	5.483.639.048	91,70	86,51
4	**Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**	**617.564.020**	**574.276.525**	**92,99**	**100**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	617.564.020	574.276.525	92,99	99,24
5	**Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**	**466.004.112**	**461.686.676**	**99,07**	**97,17**
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	459.358.512	455.276.676	99,11	100
	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	6.645.600	6.645.600	96,45	100
Total Belanja Langsung		**20.305.941.482**	**18.836.736.268**	**92,76**	**95,61**

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2024

Tabel 2-2
Evaluasi Hasil Renja SKPD Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcomes*) / kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (2024)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)100
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	**Persentase Perangkat Daerah Yang Terhubung Dengan Jaringan Intra Yang Dikelola Oleh Diskominfo**	35%	35%	35%	35%	100%	39%	46,30%	**118,7%**
		Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi	87%	87%	87%	87%	100%	93%	86,67%	**93,2%**
		Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	64%	66%	64%	66%	102,93%	66%	65,87%	**99,81%**
	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana	60%	61%	60%	61%	102,47	61%	61,48%	**100,79%**

				Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	telekomunikasi								
					Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	87%	87%	87%	87%	100%	93%	86,67%	**93,19%**
					Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	56%	56%	56%	56%	100%	73%	55,56%	**76,10%**
					Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	56%	56%	56%	56%	100%	73%	55,56%	**76,10%**
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	74%	74%	74%	74%	100%	78%	77,78%	**99,72%**
					Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	56%	33%	56%	33%	59,52	78%	33%	**42,74%**
					Persentase server sesuai standar	64%	64%	64%	64%	100%	80%	80%	**100%**
					Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	74%	74%	74%	74%	100%	78%	77,78%	**99,72%**
					Persentase wifi publik yang sudah terbangun	56%	33%	56%	33%	59,52	78%	33%	**42,74%**
					Persentase server yang mampu mengelola database	67%	67%	67%	67%	100%	83%	66,67%	**80%**
				PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	**Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial**	70%	70%	70%	70%	100%	75%	14,76%	**19,68%**
					Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	75%	75%	75%	75%	100%	79%	92,86%	**117,54%**

					Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80%	80%	80%	80%	100%	90%	14,76%	**16,40%**
					Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	90%	90%	90%	90%	100%	95%	95%	**100%**
					Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional	86%	51%	86%	51%	59,80%	93%	15,71%	**16,90%**
					Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%	51%	90%	51%	57,14%	95%	15,71%	**16,54%**
				Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	90%	90%	90%	90%	100%	100%	40%	**40%**
					Persentase jumlah	87%	105%	87%	105%	120,66%	92%	0%	**0%**

				Kabupaten/Kota	jam tayang							
					Persentase MoU yang diterbitkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	81,82%	**81,82%**
					Persentase PPID pelaksana aktif	91%	91%	91%	91%	100%	97%	12,12%	**12,50%**
					Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	76%	76%	76%	76%	100%	85%	0%	**0%**
					Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	75%	75%	75%	75%	100%	88%	0%	**0%**
					Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	90%	51%	90%	51%	56,67%	95%	15,71%	**16,54%**
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	**Indeks pembangunan Statistik (IPS)**	2,6 Poin	2,63 Poin	2,6 Poin	2,63 Poin	101,15%	2,62 Poin	0%	**0%**
					Persentase data statistik sektoral	90%	90%	90%	90%	100%	95%	0%	**0%**

					yang terintegrasi								
					Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	90%	90%	90%	90%	100%	95%	0%	**0%**
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	90%	90%	90%	90%	100%	95%	0%	**0%**
					Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	90%	85%	90%	85%	93,94	95%	0%	**0%**
					Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	60%	60%	60%	60%	100%	80%	0%	**0%**
					Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	0 Aplikasi	0 Aplikasi	**0%**
					Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	**0%**
					Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	90%	90%	90%	90%	100%	95%	0%	**0%**
					Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	50%	50%	50%	50%	100%	100%	0%	**0%**
					Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral	67%	67%	67%	67%	100%	78%	0%	**0%**

					(EPSS) kepada perangkat daerah								
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	**Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**	72%	66%	72%	66%	91,52%	75%	0%	**0%**
					Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	9,50%	**9,50%**
					Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	50%	50%	50%	50%	100%	58%	55,56%	**95,79%**
				Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sandiman yang tersertifikasi	50%	50%	50%	50%	100%	100%	50%	**50%**
					Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	60%	60%	60%	60%	100%	80%	20%	**25%**
					Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	60%	60%	60%	60%	100%	75%	65%	**86,67%**
					Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	50%	50%	50%	50%	100%	75%	87,50%	**116,67%**
					Persentase peserta yang mendapatkan	56%	56%	56%	56%	100%	67%	0%	**0%**

					nilai diatas passing grade								
					Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	50%	50%	50%	50%	100%	100%	50%	**50%**
					Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	50%	50%	50%	50%	100%	55%	0%	**0%**
					Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
					Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	**100%**
				Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik PHKS yang teramankan	33%	33%	33%	33%	100%	67%	33%	**100%**
					Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%	100%	100%	100%	**100%**	100%	100%	**100%**

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Tabel 2-3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2024 (thn n- 1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	Urusan Komunikasi dan Informatika (UU No. 23 Tahun 2024)									
	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota			87,00	93,85	99,57	96,74		99,57	
	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota			64,75	75,00	91,00	100,22		91,00	
	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.			65,16	79,16	90,00	86,50		90,00	
	Urusan Statistik (UU No. 23 Tahun 2024)									
	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.			80,87	91,85	98,00	99,24%		98,00	
	Urusan Persandian (UU No. 23 Tahun 2024)									
	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi			64,00	83,55	93,00	100%		93,00	

	Pemerintah Daerah kabupaten/kota.									
	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota.			66,5	83,5	100	-		100	
	IKK (Indikator Kinerja Kunci) Permendagri 18 Tahun 2020		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	75	85	100	100		100	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	50	60	70	100		70	
			Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	100		100	
			Persentase Organisasi Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	100	100	100		100	
			Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	100	100	100		100	
			Tingkat kemanan informasi pemerintah	70	80	80	65,89		80	

Sumber: Monev IKK Dinas Kominfo TA. 2024

1. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika

Komunikasi dan Informatika pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan akses dan kemudahan masyarakat berkomunikasi dan mendapatkan informasi di semua wilayah Kabupaten Tapin dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Hal tersebut diwujudkan dengan sasaran terwujudnya peningkatan akses, pelayanan dan kemudahan masyarakat untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi. Secara umum kinerja makro Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-4
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
1	**Urusan Komunikasi dan Informatika**					
1.1	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	100%	100%	100%	96,74%
1.2	Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota	n/a	100%	100%	105%	100,22
1.3	Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	n/a	106,67%	100%	100%	86,50

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :

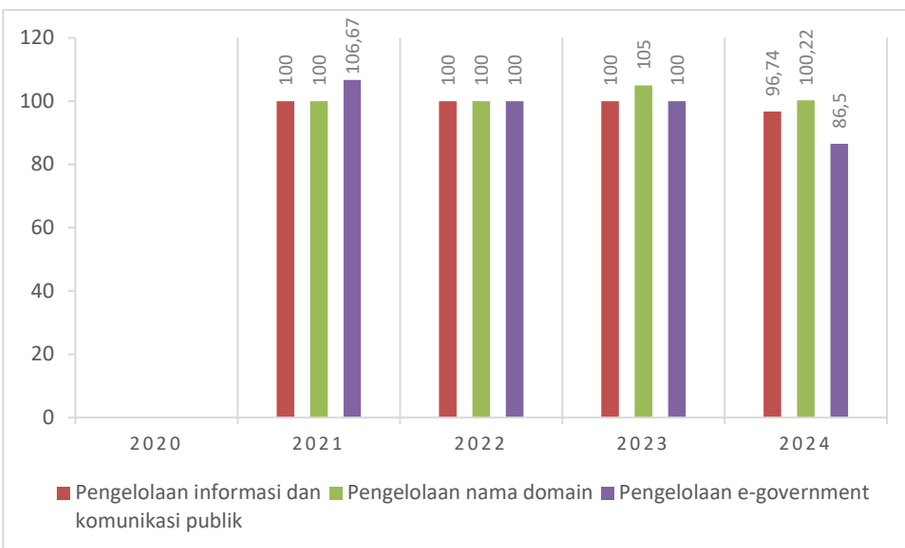

Grafik 2.1 Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2020-2024

Capaian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah kabupaten/kota menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2021 – 2023, dengan

capaian 100%, namun pada tahun 2024 terjadi perbedaan indikator atas kegiatan tersebut, adapun kinerja yang tidak tercapai tersebut yaitu pada capaian kegiatan SP4N LAPOR yang capaian nya pada tahun 2024 hanya sebesar 56,67%.

Capaian Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2021 – 2024 dengan capaian diatas 100%.

Capaian Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota juga menunjukkan kinerja yang tinggi sepanjang 2021 – 2023, namun pada tahun 2024 capaian nya turun menjadi 86,50%, hal ini karena tidak tercapainya penyediaan Wifi publik yang hanya 59,52%.

Untuk tahun 2020 Dinas Kominfo Kabupaten Tapin masih belum menggunakan Nomenklatur atas program dan kegiatan diatas tersebut.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Bidang Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-5
Kinerja Mikro Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
1	**Urusan Komunikasi dan Informatika**					
1.1	Jumlah Pemancar Telepon Genggam	93 Unit	98 Unit	109 Unit	106 Unit	106 Unit
1.2	Jumlah Pemancar Telepon Stationer	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit
1.3	Jumlah Website	32 Unit	44 Unit	75 Unit	88 Unit	89 Unit
1.4	Jumlah Aplikasi	5 Unit	6 Unit	12 Unit	12 Unit	16 Unit
1.5	Jumlah Ketersediaan WiFi Publik	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
1.6	Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL	27.350 Menit	35.450 Menit	43.550 Menit	53.930 Menit	64.310 Menit
1.7	Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik	150 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang	210 Orang
1.8	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik	45 Aduan	33 Aduan	62 Aduan	68 Aduan	68 Aduan
1.9	Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (Kim)	5 KIM	6 KIM	8 KIM	10 KIM	12 KIM
1.10	Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten	1.566 Berita	1.346 Berita	1.826 Berita	2.306 Berita	2.786 Berita
1.11	Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah	2 Media	2 Media	3 Media	3 Media	12 Media

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Pemancar Telepon Stasioner

   Komunikasi merupakan sektor yang penting dewasa ini, untuk menunjang kegiatan yang berkaitan dengan komunikasi di Kabupaten Tapin tahun 2024 terdapat 1 menara pemancar telepon stasioner milik PT. Telkom yang berlokasi di Jalan Pembangunan Kantor Perwakilan Telkom Kota Rantau.

2. Jumlah Pemancar Telepon Genggam

   Selain pemancar telepon stasioner juga terdapat pemancar telepon genggam yang tersebar hampir disemua wilayah Kabupaten Tapin, pada akhir tahun 2024 terdapat 106 menara BTS *(Base Transceiver Station)* swasta yang tersebar disemua Kecamatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2-6
Data Jumlah Menara BTS Swasta Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	KECAMATAN	JUMLAH	PERSENTASE
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Binuang	26	24,52%
2	Hatungun	5	4,58%
3	Tapin Selatan	11	10,37%
4	Salam Babaris	6	5,50%
5	Tapin Tengah	5	4,58%
6	Bungur	6	5,50%
7	Piani	7	6,60%
8	Lokpaikat	8	7,54%
9	Tapin Utara	16	15,09%
10	Bakarangan	2	1,83%
11	Candi Laras Selatan	6	5,50%
12	Candi Laras Utara	7	6,42%
Jumlah		**106**	**100,0%**

Sumber : Statistik Sektoral Tahun 2024

Berdasarkan jumlah provider opearator selular yang tersedia dapat dilihat dalam diagram berikut ini :

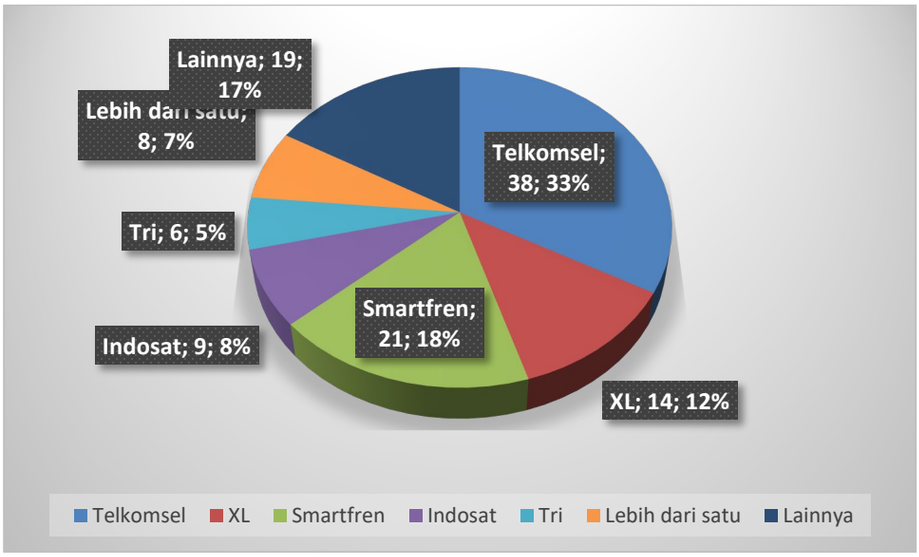

Grafik 2.2 Provider Operator Selular

Berdasarkan tabel Data menara BTS *(Base Transceiver Station)* swasta yang disediakan oleh berbagai provider operator selular dengan jumlah masing-masing Telkomsel ada 38 unit, XL ada 14 unit, Smartfen ada 12 unit, Indosat ada 9 unit, TRI ada 6 unit, lebih dari satu operator 8 unit, dan operator lainnya 19 unit. Meskipun sudah banyak jenis provider yang sinyalnya dapat beroperasi dengan baik, namun masih terdapat desa yang masih belum sepenuhnya mendapatkan jaringan karena aksesnya terbatas.

3. Jumlah Website

   Sebuah situs web biasanya ditempatkan setidaknya pada sebuah server web yang dapat diakses melalui jaringan seperti Internet, ataupun jaringan area lokal (LAN) melalui alamat Internet. Alamat suatu situs di Internet disebut nama domain. Dengan kata lain alamat website yang digunakan untuk menemukan suatu informasi bahkan untuk berkomunikasi dibuatkan kedalam suatu Sistem elektronik.

   Sistem Elektronik yang Terdaftar sesuai Ketentuan peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 di Kabupaten Tapin pada akhir tahun 2024 sebanyak 89 website dari 50 OPD melalui domain utama Dinas Kominfo yaitu tapinkab.go.id.

4. Jumlah Aplikasi

   Bersamaan dengan semakin banyaknya teknologi baru yang diperkenalkan pada masyarakat, maka beberapa kegiatan yang dilakukan secara manual pun mulai beralih secara otomatis. Sehingga, terdapat suatu perkembangan teknologi di era digital yang terus berjalan dengan cepat. Ketika membahas tentang digitalisasi, maka bidang komunikasi adalah bidang yang mengalami perkembangan paling cepat. Memasuki perkembangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Pemerintah Kabupaten Tapin,

maka Setiap layanan dituntut untuk menggunakan layanan berbasis digital (Aplikasi). Sampai pada akhir Tahun 2024 Aplikasi Layanan baik layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan Sistem penghubung layanan pemerintah ada 16 layanan, melalui layanan Aplikasi ESAKIP terintegrasi dengan SIMDA dan PADARINGAN, Web Profile terintegrasi dengan Tapinkab, TPP Online terintegrasi dengan SIMPEG, Tapinkab terintegrasi dengan PORTAL TAPIN, E-TAMASA terintegrasi dengan E-SAKIP dan SIMPEG, TIK terintegrasi dengan SIMPEG, E-OFFICE terintegrasi dengan SIMPEG, SIDAK terintegrasi dengan SIMPEG, Govem terintegrasi dengan Tapinkab, JDiH terintegrasi dengan Tapinkab, Tapin Mesra terintegrasi dengan Tapinkab, SIPaT terintegrasi dengan Tapinkab.

5. Jumlah Ketersediaan WIFI Publik

   Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, ketersediaan jaringan internet merupakan kunci lancarnya komunikasi dan informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyediakan fasilitas wifi untuk layanan publik. Akses wifi gratis untuk publik ini tersebar di tiga lokasi yang pertama berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, lokasi kedua di BPK (Barisan Pemadam Kebakaran) yang berada di jalan MTQ, dan lokasi ketiga di Lapangan Tenis Tapin Putra. Masyarakat Tapin dapat menggunakan fasilitas WiFi tersebut dengan kecepatan bandwidth sampai dengan 30 Mbps. Meskipun tergolong mumpuni namun seiring perkembangan waktu kecepatan banwidth tersebut masih perlu ditingkatkan dan memperbanyak sebaran lokasi keberadaan wifi publik sehingga kedepan diharapkan area publik Tapin *well connected* yang jaringan internetnya tanpa terputus. Dan juga dilakukan pembatasan akses masyarakat untuk mencari informasi-informasi yang baik dan benar untuk menghindari informasi hoaks.

6. Hasil Penayangan Kerjasama Pemda dengan LPPL

   Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disingkat LPPL adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi. LPPL berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa, dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

   LPPL Kabupaten Tapin dibentuk pada tahun 2009 dengan Peraturan Daerah

Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Tapin TV. Selama periode Tahun 2020 – 2024 LPPL Tapin TV sudah melakukan penayangan selama 64.310 Menit.

Kemudian pada akhir tahun 2022, mendasari Peraturan Menteri Kominfo No. 05 tahun 2012, mengadopsi standar penyiaran televisi digital terestrial Digital Video Broadcasting. LPPL Tapin TV ikut berpartisipasi dalam migrasi siaran Analog ke Digital. Dalam hal ini, pemerintah daerah berusaha untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menganggapnya sebagai suatu peluang bagi pengembangan industri penyiaran ke depan.

7. Jumlah SDM yang Paham tentang Opini dan Aspirasi Publik

   Reformasi birokrasi tidak terlepas dari delapan area perubahan, salah satu diantaranya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah. Hal inilah yang dituntut oleh masyarakat di mana pun, termasuk Kabupaten Tapin. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan saluran untuk mempertanyakan terkait dengan layanan publik yang sudah diberikan oleh setiap jajaran pemerintah melalui aplikasi SP4N-Lapor. SP4N-Lapor merupakan inovasi yang dibutuhkan masyarakat sebagai saluran informasi yang bisa digunakan untuk menyampaikan masukan, saran, dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Apalagi, SP4N-Lapor ini terintegrasi ke pemerintah pusat sehingga menjadi indikator penilaian, apakah pemerintah kabupaten Tapin dapat memberikan pelayanan publik yang baik atau tidak. Dalam hal optimalisasi pengelolaan SP4N-Lapor ini dibantu oleh admin di masing-masing OPD. Sampai dengan tahun 2024 ini ada 210 orang yang sudah mendapatkan pelatihan, sehingga keberadaan mereka diharapkan dapat menjadi agen informasi dan memberikan wawasan admin SP4N-Lapor untuk memberikan layanan publik yang cepat, tanggap, dan responsif terhadap laporan masyarakat.

8. Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik

   Aduan dan aspirasi dalam pelayanan publik umum terjadi ketika masyarakat selaku pengguna layanan tidak puas atas pelayanan yang diberikan, bahkan menambah kekecewaan ketika laporan yang disampaikan tidak dikelola dan

ditanggapi secara baik oleh petugas pengaduan.

Di Kabupaten Tapin sampai dengan tahun 2024 terdapat 234 aduan yang masuk ke dalam Aplikasi SP4N-Lapor, sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk terkait jalan, PDAM, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi, trantibum dan perlindungan Masyarakat, sarana prasarana infrastruktur lainnya, transportasi, ASN, pasar, transportasi dan lainnya. Namun semua aduan dapat terdisposisi dengan baik dan terselesaikan dengan baik dari Instansi penerima aduan. Adanya laporan tersebut memang sudah menjadi trend pengaduan di masyarakat. Ini PR bagi daerah, bagaimana setiap laporan dari masyarakat secepatnya dianalisa, direspon, ditanggapi secara cepat untuk diteruskan serta ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh OPD terkait.

9. Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

   Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan nilai tambah.

   Kelompok Informasi Masyarakat yang dibentuk dan telah melaksanakan tugas dan fungsinya. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sampai pada tahun 2024 berjumlah 12 Kelompok tersebar di 12 Desa di Kabupaten Tapin. Semakin banyak jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) maka menggambarkan penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat berjalan dengan baik dan berjalan 2 (Dua) arah.

10. Jumlah Berita yang Diposting di Website Kabupaten / Jumlah Diseminasi Informasi melalui Website Kabupaten

    Sampai pada akhir tahun 2024 Jumlah berita yang diposting di website kabupaten sebanyak 2.786 berita, meliputi dokumentasi kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat melalui media sosial Dinas Kominfo, agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.

11. Jumlah Media yang Bekerjasama Dalam Penyebarluasan Informasi Daerah.

    Pada tahun 2024 media yang bekerjasama dalam penyebarluasan informasi daerah di Kabupaten Tapin ada 12 Media yang dikerjasamakan dengan media luar dalam meliput kegiatan kepala daerah dan kegiatan pemerintah daerah dilingkup kabupaten Tapin untuk di sebar luaskan ke seluruh lapisan masyarakat agar terciptanya kegiatan pemerintahan yg transparan.

2. Urusan Bidang Statistik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 25 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Statistik. Perkembangan capaian kinerja penyelenggaran daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Statistik di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020 - 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2-7
Kinerja Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(6)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**Urusan Statistik**					
2.1	Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	99,24%

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :

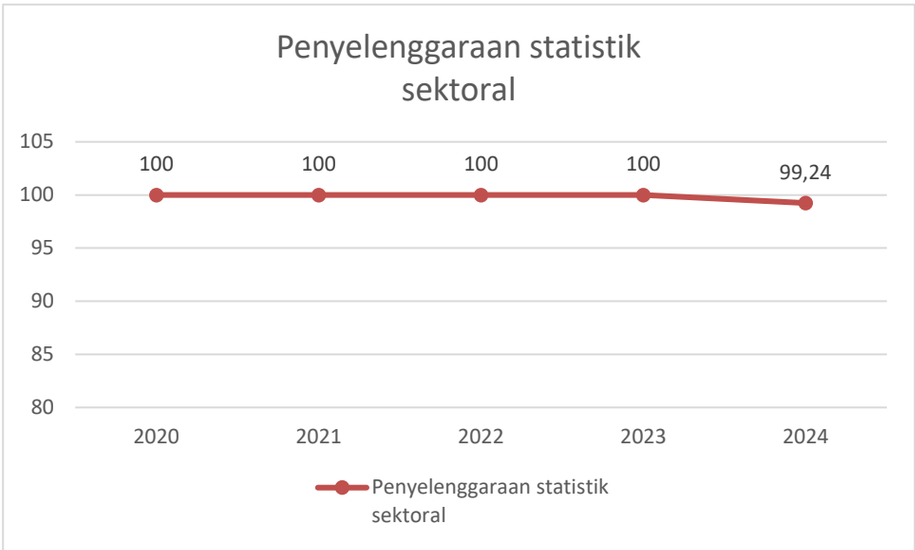

Grafik 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2020-2024

Capaian Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah kabupaten/kota menunjukkan konsistensi kinerja sepanjang 2020 – 2024, dengan capaian 100% kategori tinggi, namun pada tahun 2024 kinerja menurun sebesar 0,76% menjadi 99,24%. Adapun kinerja yang tidak tercapai tersebut yaitu masih belum maksimalnya perangkat daerah dalam mengumpulkan data statistik sektoral, meskipun semua perangkat daerah sudah melaksanakan kegiatan statistik sektoral, jika dirata-ratakan dari tahun 2020-2024 maka kinerja nya sudah tinggi pada 93,94%.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Statistik dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-8
Kinerja Mikro Penyelenggaran Daerah Urusan Statistik
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(6)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
2	**Urusan Statistik**					
2.1	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	-	-	1 Sistem	1 Sistem	1 Sistem
2.2	Tersedianya Buku "Kabupaten Dalam Angka"	250 Buah	300 Buah	350 Buah	400 Buah	450 Buah
2.3	Tersedianya Buku "PDRB"	250 Buah	300 Buah	350 Buah	400 Buah	450 Buah
2.4	Tersedianya Buku Statistik Sektoral	-	-	60 Buah	120 Buah	180 Buah
2.5	Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro	-	-	50 Buah	100 Buah	150 Buah

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas secara komulatif dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya Sistem Data dan Statistik Terintegrasi

   Sistem data dan statistik terintegrasi tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin diwujudkan dalam rangka menuju Tapin Satu Data, dengan menggunakan Aplikasi SIDAK (Sistem Informasi Data Kepemerintahan) dengan alamat website : www.sidak.tapinkab.go.id. Semakin banyak data informasi yang terupload pada website, semakin baik juga proses diseminasi informasi di Kabupaten Tapin. Namun sementara ini masih perlu dilakukan upaya peningkatan terhadap pengelolaan system data ini, baik kapasitas pengelola data maupun pihak lain sebagai produsen data.

2. Tersedianya Buku KDA dan PDRB

   Data statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis. Sampai dengan Tahun 2024, Buku KDA (Kabupaten Dalam Angka) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik, dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 450 buah.

3. Tersedianya Buku Statistik Sektoral

   Setiap perangkat daerah membuat daftar data statistik sektoral yang berisi tentang kondisi eksisting seluruh Perangkat Daerah kepada unit pengelola statistik untuk membuat daftar data statistik sektoral yang dimanfaatkan oleh masing-masing perangkat daerah. Sampai dengan Tahun 2024, Buku Statistik Sektoral yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 180 buah.

4. Tersedianya Buku Statistik Ekonomi Makro

   Sampai dengan Tahun 2024, Buku Statistik ekonomi Makro yang diterbitkan dan didiseminasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika sebanyak 150 buah.

3. Urusan Bidang Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh perangkat daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya. Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Urusan Persandian di Kabupaten Tapin pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2-9
Kinerja Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian
Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PELAYANAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
3	**Urusan Persandian**					
3.1	Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	70%	80%	100%	100%	100
3.2	Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat	-	-	-	-	100

	Daerah kabupaten/kota.					

Sumber: Rekapitulasi Monev Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Dari tabel diatas dapat digambarkan ke dalam grafik capaian dibawah ini :

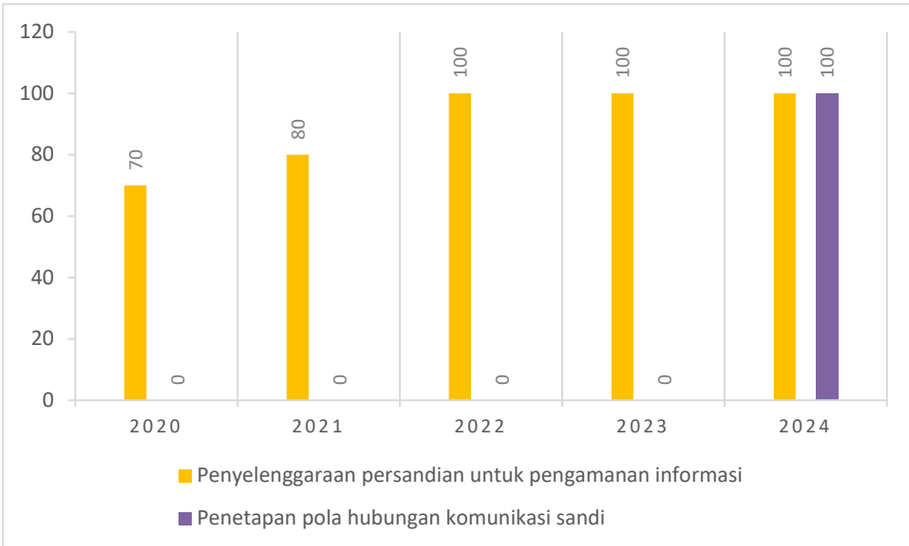

Grafik 2.4 Kinerja Urusan Penyelenggaraan Persandian Tahun 2020-2024

Capaian Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah kabupaten/kota menunjukkan peningkatan dan konsistensi kinerja sepanjang 2020 – 2024, dengan capaian 100% kategori tinggi, melalui optimalisasi penggunaan Sertifikat Elektronik bagi perangkat daerah.

Capaian Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar- Perangkat Daerah kabupaten/kota untuk periode ini baru dilaksanakan pada tahun 2024 melalui penyusunan kebijakan daerah mengenai PHKS dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 100.3.3.2/163/KUM/2024 tentang Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Kemudian pada kinerja mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2-10
Kinerja Mikro Penyelenggaraan Daerah Urusan Persandian Kabupaten Tapin Tahun 2020–2024

No	URUSAN BIDANG/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
A	**Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**					
3	**Urusan Persandian**					
3.1	Jumlah Pengguna Tandatangan Elektronik	-	39	60	81	97

Sumber: Rekapitulasi Data Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2024 jumlah pengguna aktif Tandatangan Elektronik (TTE) sebanyak 97 orang pada 54 Perangkat Daerah, artinya semua Perangkat Daerah sudah memanfaatkan TTE atau Capaian kinerja 100%.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Tapin.

Penataan pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan gambaran yang riil dan akurat terkait semua potensi maupun kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntable, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang ingin dicapai.

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon khusus dan social media menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun berikutnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah yang tidak hanya sebagai penyedia layanan namun juga sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan tujuan daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap

yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil review pencapaian kinerja diskominfo 2024 dan 2025 (berjalan) dapat dikatakan bahwa kinerja pelayanan Bidang Kominfo telah berlangsung cukup baik. Namun sebagaimana umumnya yang terjadi dalam pelayanan IT di pemerintah daerah di berbagai wilayah, maka masih terdapat beberapa permasalahan yang sangat krusial dalam rangka pengembangan teknologi informasi, diantaranya :

1. Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
2. Aplikasi e-government belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
3. Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas
4. Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
5. Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal

Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan Informatika Kab. Tapin dari sisi internal antara lain: tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana, tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi informasi, kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi,dan kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2-11
Sumber Daya Dan Sarana/Prasarana Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2024

No	Urusan Kominfo / Program	Sumber Daya / Sarana-Prasarana	Jumlah
1	Layanan Infrastruktur E-Government	Pemancar Telepon Genggam	106 Unit
		Pemancar Telepon Stasioner	1 Unit
		Jaringan Fiber Optic	25 SKPD
		CCTV	26 Titik
		Server	5 Unit
2	Pengembangan Data dan Aplikasi	Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Kabupaten	89 Website
		Tenaga IT yang tersertifikasi	6 Orang

		ASN Pengelola TIK yang tersertifikasi	5 Orang
3	Statistik	ASN Pengelola Statistik Sektoral tersertifikasi Dinas Kominfo	-
4	Persandian	ASN Pengelola Pengamanan Persandian tersertifikasi Dinas Kominfo	2 Orang
5	Pengelolaan Informasi Publik	Layanan Publik Online dan Terintegrasi	1 Layanan
		Pejabat Penghubung Layanan LAPOR SP4N Kabupaten	60 Orang
		Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Kabupaten	16 KIM

Sumber: Dinas Kominfo TA. 2024

Adapun isu strategis yang saat ini cukup banyak mendapatkan perhatian dari berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin adalah :

1. Transformasi Digital;
2. Tapin Satu Data;
3. Keamanan Informasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Tabel 2-12
Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Lembar : ……

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TAPIN	Nilai Komponen AKIP	81 Poin	11.442.956.523	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TAPIN	Nilai Komponen AKIP	81 Poin	5.411.129.599	
		TAPIN	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %			TAPIN	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %		
		TAPIN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100 %			TAPIN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100 %		
		TAPIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 %			TAPIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 %		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	18.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	18.320.000	
		TAPIN	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %			TAPIN	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %		
		TAPIN	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %			TAPIN	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %		
A	Penyusunan Dokumen	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan	10 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	8.000.000	

	Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			Perencanaan Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	12.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.320.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan	100 %	3.143.123.089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan	100 %	3.998.236.103	
		TAPIN	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100 %			TAPIN	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %		
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	3.137.123.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang	3.992.236.103	
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	

C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	54 %	1.911.414.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TAPIN	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	54 %	767.423.200	
A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	52.635.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.200.200	
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	291.631.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	345.403.500	
C	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.010.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.404.000	
D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.960.000	
E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan	12 Laporan	1.497.138.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	12 Laporan	304.455.000	

			Konsultasi SKPD			SKPD		dan Konsultasi SKPD			
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	0 %	4.932.797.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	0 %	0	
A	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4.932.797.350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Sekretariat	100 %	616.229.164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100 %	506.530.576	
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371.051.724	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.641.576	
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.177.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.889.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	820.792.020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100 %	120.619.720	
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	80.170.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52.781.560	

B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.131.030	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	21.895.500	
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	715.490.540	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	45.942.660	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
II	PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	TAPIN	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	75 %	2.336.850.020	PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	TAPIN	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	92 %	1.850.126.600	
		TAPIN	Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	79 %							
		TAPIN	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	90 %			TAPIN	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80 %		
		TAPIN	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	95 %			TAPIN	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	96 %		
		TAPIN	Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional	93 %			TAPIN	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan	92 %		

			layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional					Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)			
		TAPIN	Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	95 %							
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	100%	2.336.850.020	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase jumlah jam tayang	92 %	1.850.126.600	
		TAPIN	Persentase jumlah jam tayang	92 %							
		TAPIN	Persentase MoU yang diterbitkan	100%			TAPIN	Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	56 %		
		TAPIN	Persentase PPID pelaksana aktif	97%			TAPIN	Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	88%		
		TAPIN	Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	85%							
		TAPIN	Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional	88%			TAPIN	Persentase Pejabat Penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	91 %		

			layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)								
		TAPIN	Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	95%							
A	Relasi Media	Kabupaten Tapin	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	1.451.419.200	Relasi Media	Kabupaten Tapin	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	6 Laporan	1.406.525.000	
B	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	24.684.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	5.390.000	
C	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan	148.879.980	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohona n	117.552.400	
D	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan	Kabupaten Tapin	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap	4 Rekomenda	265.308.230	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan	Kabupaten Tapin	Jumlah rekomendasi	4 Rekomenda	37.278.200	

	Aspirasi Publik		isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	si		Aspirasi Publik		komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	si		
E	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	4 Media	434.334.710	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	4 Media	275.626.000	
F	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	4 Orang	12.223.900	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Kabupaten Tapin	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	4 Orang	7.755.000	
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	39%	8.726.079.813	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	78%	3.254.950.926	
		TAPIN	Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi	93%			TAPIN	Persentase Aplikasi yang sudah terintegrasi	80%		
		TAPIN	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	66%			TAPIN	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	57%		
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	TAPIN	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	61%	1.332.287.426	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di	TAPIN	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan	71%	1.304.944.776	
		TAPIN	Persentase aplikasi	93%							

	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		yang sudah terintegrasi			Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		terintegrasi			
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	73%							
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	73%							
A	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	95 Dokumen	1.332.287.426	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	1.304.944.776	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	78%	7.393.792.387	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	TAPIN	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	72 %	1.950.006.150	
		TAPIN	Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	78%			TAPIN	Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	43 %		
		TAPIN	Persentase wifi publik yang sudah terbangun	78%							
		TAPIN	Persentase server sesuai standar	80%			TAPIN	Persentase server sesuai standar	71 %		
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	78%							
		TAPIN	Persentase server yang mampu mengelola database	83%							
A	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	15 Laporan	475.354.400	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Laporan	391.284.400	
B	Koordinasi	Kabupaten	Jumlah Dokumen	4 Dokumen	387.254.940	Koordinasi	Kabupaten	Jumlah Dokumen	8 Dokumen	173.950.690	

	Pelaksanaan Manajemen SPBE	Tapin	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			Pelaksanaan Manajemen SPBE	Tapin	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE			
C	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapin	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	95 Aplikasi	478.210.466	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapin	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	21.900.000	
D	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21 Perangkat Daerah	2.355.685.381	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Tapin	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21 Perangkat Daerah	125.419.660	
E	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	54 Dokumen	2.518.850.300	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	1.155.690.000	
F	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Tapin	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	7 Program	1.178.436.900	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kabupaten Tapin	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	2 Program	81.761.400	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	TAPIN	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,62 Poin	719.970.630	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK	TAPIN	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,63 Poin	552.199.700	
		TAPIN	Persentase data	95%			TAPIN	Persentase data	52%		

			statistik sektoral yang terintegrasi			SEKTORAL		statistik sektoral yang terintegrasi			
		TAPIN	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	95%			TAPIN	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	52%		
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	95%	719.970.630	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	100%	552.199.700	
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	95%							
		TAPIN	Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	80%			TAPIN	Persentase perangkat daerah yang telah mendapat bimtek/desk statistik sektoral	64%		
		TAPIN	Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dokumen							
		TAPIN	Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	95%			TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang di Monev Statistik Sektoral	100%		
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	100%							
		TAPIN	Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	78%							
A	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Tapin	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	17 Orang	225.577.910	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Kabupaten Tapin	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	338.826.600	

B	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Tapin	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	15.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Tapin	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	0	
C	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Tapin	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	4 Dokumen	479.392.720	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Kabupaten Tapin	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	9 Dokumen	213.373.100	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TAPIN	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	75%	492.825.902	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	TAPIN	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	66%	364.799.700	
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%			TAPIN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	47%		
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	58%			TAPIN	Jumlah Kegiatan Computer Security Icident Response Team (CSIRT)	92%		
							TAPIN	Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	20%		
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	80%	484.063.902	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	43%	269.158.200	
		TAPIN	Persentase SOP	75%							

			Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan								
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	75%							
		TAPIN	Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	67%			TAPIN	Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	88%		
		TAPIN	Persentase sandiman yang tersertifikasi	100%							
		TAPIN	Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	100%							
		TAPIN	Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	55%			TAPIN	Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	92%		
		TAPIN	Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%							
		TAPIN	Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%							
A	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non	4 Laporan	256.883.002	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik	7 Laporan	163.045.200	

			Elektronik					dan Non Elektronik			
B	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	227.180.900	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	106.113.000	
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase titik PHKS yang teramankan	67%	8.762.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	92%	95.641.500	
		TAPIN	Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%							
A	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	21 Perangkat Daerah	8.762.000	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	95.641.500	
		JUMLAH			**23.718.682.888**				**JUMLAH**	**11.433.206.525**	

Dinas Kominfo telah membangun sarana Jaringan Fiber Optik dengan Jangkauan 4 Km meliputi wilayah Perkantoran Setda, Diskominfo, Disdukcapil, BKAD, DPMPTSP, Bappelitbang, Satpol PP, BPBD, Bappenda, UKPBJ (LPSE), Inspektorat, Dinas Sosial, Disputarsip, dan 12 Kecamatan. Kemudian seiring perencanaan kedepan Dinas Kominfo harus didukung dengan sarana dan prasarana jaringan komunikasi dan data center/pusat data dan ini membutuhkan sarana penunjang yang memadai, tersedia nya ruang khusus Command Center serta perlengkapan penunjangnya. Namun hingga saat ini belum tersedia anggaran untuk mendukung pembangunan Command Center ini. Disamping itu, sebelumnya sudah terpasang 6 CCTV dari rencana target sebanyak 30 titik sampai dengan tahun 2026 yaitu, Simpang Jl. Datu Suban, Area RB Tapin, Simpang Jl. Datu Nuraya, Bundaran Rantau, Jl. A. Yani, Alun Alun Basimban Dwi Dharma. Dan pada tahun 2024 telah dibangun juga CCTV pada 12 Kecamatan. Meskipun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap namun diiharapkan dengan adanya jaringan dan CCTV ini dapat meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kabinet Merah Putih membawa visi besar untuk menjadikan Indonesia mandiri dan maju di era digital melalui program transformasi sesuai Asta Cita. Pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur digital yang merata hingga ke pelosok tanah air, sebagai langkah strategis untuk menghapus kesenjangan digital dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Langkah ini diiringi dengan digitalisasi data untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan koordinasi antar lembaga, yang menjadi landasan pemerintahan berbasis digital yang transparan dan akuntabel. Di sektor ekonomi, digitalisasi menjadi fokus utama untuk mendukung kemandirian bangsa, terutama dengan meningkatkan inovasi teknologi seperti pertanian digital dan platform pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pemerintah mendorong pengembangan sumberdaya manusia unggul melalui program literasi digital dan kolaborasi dengan lembaga pendidikan serta industri. Inovasi digital juga dimanfaatkan untuk mempromosikan budaya Indonesia secara global, menjaga identitas nasional, dan menciptakan ekosistem digital yang kompetitif.

Kementerian Komunikasi dan Digital mendorong pertumbuhan industri penyiaran nasional. Upaya ini selaras dengan penerapan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen. Pemerintah optimistis bahwa ada pertumbuhan bahkan sejajar dengan program yang dicanangkan Pemerintahan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Pada sektor penyiaran, industri yang bertumbuh di ekosistem penyiaran ini bisa menopang pertumbuhan tersebut. Pertumbuhan industri penyiaran masih terbuka. Program Analog Switch Off (ASO) yang menditalisasi siaran televisi di Indonesia berpotensi mendorong pertumbuhan industri penyiaran. Dampak ekonomi yang akan dihadapi, terutama tranformasi digital yang begitu masif mengubah lanskap bisnis model dari industri penyiaran dan industri media secara global.

Kutipan dari Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Sehubungan dengan pasca pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam membangun akses komunikasi dan informasi ke desa-desa di wilayah perbatasan melalui beberapa program dan kegiatan. Diantaranya dengan memberdayakan Lembaga Komunikasi Sosial (LKS) yang ada, seperti Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Melalui KIM yang berfungsi sebagai simpul komunikasi antara pemerintah dan masyarakat juga berperan sebagai penyebar (*disseminator*) informasi kepada masyarakat. Keberadaan LKS bermanfaat untuk memfilter informasi yang beredar di masyarakat, sehingga keberadaan dan keberlangsungannya perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah. Demikian juga keberadaan kelompok-kelompok masyarakat pemerhati media sosial perlu juga untuk dibina dan diberdayakan dalam rangka menangkal penyebaran berita negatif menyangkut penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah diharapkan dapat hadir di semua kalangan masyarakat, agar tidak terjadi kesenjangan informasi pada setiap tingkatan masyarakat.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pemerintah Kabupaten Tapin berkewajiban untuk mengamankan informasi yang dikelola agar nantinya validasi informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat terjaga. Perlu diadakan literasi dan sosialisasi bagi instansi-intansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dapat menjaga kerahasian, integritas, dan ketersediaan informasi yang diperlukan. Perlunya integrasi aplikasi instansi-instansi Pemerintah Kabupaten Tapin sehingga informasi yang disajikan berkualitas yaitu cepat, akurat dan relevan.

Untuk menunjang kelancaran dalam penerapan teknologi Informasi di Pemerintah Kabupaten Tapin, telah dilaksanakan pemasangan Jaringan Fiber Optik untuk melayani komunikasi berbasis internet maupun intranet di Pemerintah Kabupaten Tapin. Namun beberapa instansi masih belum terjangkau jaringan Fiber Optik. Dalam perkembangannya infrastruktur jaringan juga harus terlayani dengan baik. Sementara untuk memberikan pelayanan publik tingkat Desa/Kelurahan berbasis teknologi informasi, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mendesain pembangunan infrastruktur TI di Desa/Kelurahan. Desain itu juga untuk mengintegrasikan informasi pemanfaatan APBD dan Dana Desa serta Sistem Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 merupakan pelaksanaan pembangunan RPJMD dan Renstra Tahun 2025-2029 Sesuai dengan Surat Edaran Nomor 900.1.1/640/SJ tentang penyesuaian arah

kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan rencana kerja pemerintah daerah dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025.

Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Perumusan tujuan dan sasaran adalah tahap yang strategis, menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah secara keseluruhan.

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin merujuk pada Misi Kepala Daerah yang ke 5 (lima) dan Tujuan Daerah yaitu "**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, inovatif dan berintegritas".**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah :

"Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah & Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT"

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggamb arkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Adapun sasaran yang ingin diwujudkan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
2. Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Definisi operasional dari masing-masing tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3-1
Definisi Operasional dari Indikator Kinerja Utama Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

TUJUAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di perangkat daerah	Perencanaan Kinerja = 30%, Pengukuran Kinerja = 30%, Pelaporan Kinerja = 15%, Evaluasi Kinerja = 25%	Nilai LHE AKIP Dinas Kominfo Kab. Tapin
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	RATA RATA SKOR = ∑ (Skor tiap responden	Survey Kepuasan

Publik Berbasis IT	(Diskominfo)	Diskominfo adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Diskominfo	pada setiap parameter) _____ Jumlah Responden NILAI INDEKS = ∑ (Rata-rata skor tiap parameter) _____ Jumlah Parameter IKM = Nilai Indeks x 25 *Karena nilai indeks berada di rentang [1,0 – 4,0], setelah dikali 25, rentang IKM menjadi [25 – 100]	Layanan Diskominfo
SASARAN	**INDIKATOR**	**DEFINISI OPERASIONAL**	**RUMUS PERHITUNGAN**	**SUMBER DATA**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di perangkat daerah	Perencanaan Kinerja = 30%, Pengukuran Kinerja = 30%, Pelaporan Kinerja = 15%, Evaluasi Kinerja = 25%	Nilai LHE AKIP Dinas Kominfo Kab. Tapin
Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas ASN adalah indikator kuantitatif yang menggambarkan kualitas ASN di perangkat daerah, berdasarkan empat dimensi: kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin	Upload data Penghargaan, Diklat Teknis, Diklat struktural dan Diklat Fungsional untuk ASN di Apikasi Padaringan	Aplikasi Padaringan/ MyASN
Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin	Indeks yang mengukur tingkat penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada instansi pemerintah	Nilai indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) kabupaten tapin / Hasil Indeks SPBE dengan keterangan nilai 4,2 – 5,0 Memuaskan, 3,5 – < 4,2 Sangat Baik, 2,6 – < 3,5 Baik, 1,8 – < 2,6 Cukup, dan < 1,8 Kurang	LHE SPBE Pemerintah Kab. Tapin

Sumber: Lampiran Format Tabel Definisi Operasional IKU Eselon II Dinas Kominfo

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah 5 (lima) tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika beserta indikator dan target kinerjanya dapat dilihat dalam cascading kinerja pada Tabel 3-2 berikut ini:

Tabel 3-2
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah			**Nilai SAKIP (Poin)**	71	72,95	74,9	76,85	78,8	80,75	82,7	
	Meningkatnya Tata Kelola Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		**Nilai SAKIP (Poin)**	79,05	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	79,05	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	86,00	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah (Poin)	77,3	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT			**Indeks Kepuasan Masyarakat (Poin)**	**87,03**	**87,41**	**87,79**	**88,17**	**88,55**	**88,93**	**89,31**	
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT		**Indeks Kepuasan Masyarakat (Diskominfo) (Poin)**	**-**	**-**	**86,00**	**87,00**	**88,00**	**89,00**	**90,00**	
		Meningkatnya Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Tapin (poin)	3,81	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5	

3.3. Program dan Kegiatan

Bertitik tolak dari visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Tapin, di mana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dititik beratkan dalam rangka mendukung misi kelima dari misi Pemerintah Daerah serta memperhatikan hasil analisis baik dari lingkungan internal maupun eksternal.

Awal usulan program kegiatan 2025 meliputi 5 program urusan kominfo (11 kegiatan) dan 1 Program kegiatan pendukung, 4 Program kegiatan sasaran dengan memperhatikan pada rancangan awal RKPD Kabupaten Tapin tahun 2025. Guna mendapat hasil yang optimal sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, secara terinci disusun program, indikator, dan kegiatan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2025 dan memiliki target kinerja yang akan dicapai sesuai Rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika (tidak termasuk program Administrasi Umum) dan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam program mencakup beberapa indikator yang menggambarkan keberhasilan program, dan setiap indikator didukung oleh beberapa kegiatan.

Tabel 3-3
Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Diskominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika — Lembar : 1 dari 2

No	Urusan Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif Tahun 2025	Prakiraan Maju Tahun 2026	
					Tolak Ukur	Target		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			TAPIN	Nilai Komponen AKIP	81 Poin	5.411.129.599	82 Poin	5.681.686.079
				TAPIN	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	
				TAPIN	Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100 %		100 %	
				TAPIN	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 %		100 %	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	18.320.000	100 %	19.236.000
				TAPIN	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %		100 %	
				TAPIN	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %		100 %	
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000	6 Dokumen	8.400.000
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	10.320.000	4 Laporan	10.836.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan	100 %	3.998.236.103	100 %	4.198.147.908
				TAPIN	Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai	100 %		100 %	

					Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)				
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	3.992.236.103	288 Orang/Bulan	4.191.847.908
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	3.150.000
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	2 Laporan	3.150.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah			TAPIN	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	54 %	767.423.200	90 %	805.794.360
A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	42.200.200	12 Paket	44.310.210
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	345.403.500	12 Paket	362.673.675
C	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.404.000	12 Paket	59.224.200
D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.960.000	12 Laporan	19.908.525
E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	304.455.000	12 Laporan	319.677.750
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	0 %	0	95 %	0
A	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100 %	506.530.576	100 %	531.857.105
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.641.576	12 Laporan	278.923.655
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	ASN	ASN	Kabupaten	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	240.889.000	12 Laporan	252.933.450

	Kantor			Tapin	Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			TAPIN	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100 %	120.619.720	95 %	126.650.706
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52.781.560	3 Unit	55.420.638
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	21.895.500	2 Unit	22.990.275
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	45.942.660	3 Unit	48.239.793
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
II	PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			TAPIN	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	92 %	1.850.126.600	94 %	1.942.632.930
				TAPIN	Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80 %		85 %	
				TAPIN	Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	96 %		97 %	
				TAPIN	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)	92 %		94 %	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang di bina	56 %	1.850.126.600	64 %	1.942.632.930
				TAPIN	Persentase jumlah jam tayang	92 %		94 %	
				TAPIN	Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	88%		91 %	
				TAPIN	Persentase Pejabat Penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	91%		93 %	
A	Relasi Media	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten	Jumlah aktivitas relasi media kepada	5 Laporan	1.406.525.000	5 Laporan	1.476.851.250

				Tapin	media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media				
B	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	5.390.000	1 Komunitas	5.659.500
C	Pelayanan Informasi Publik	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	117.552.400	3 Permohonan	123.430.020
D	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	37.278.200	4 Rekomendasi	39.142.110
E	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	4 Media	275.626.000	4 Media	289.407.300
F	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Masyarakat	Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	4 Orang	7.755.000	4 Orang	8.142.750
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA			TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo	78%	3.254.950.926	82%	3.417.698.472
				TAPIN	Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	57%		58%	
				TAPIN	Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	80%		85%	
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71%	1.304.944.776	79 %	1.370.192.015
A	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	1.304.944.776	4 Dokumen	1.370.192.015
2	Pengelolaan e-government Di			TAPIN	Persentase kualitas akses internet dengan	72 %	1.950.006.150	75 %	2.047.506.458

	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				kecepatan rata-rata 50 Mbps				
				TAPIN	Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	43 %		57 %	
				TAPIN	Persentase server sesuai standar	71 %		71 %	
A	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Laporan	391.284.400	3 Laporan	410.848.620
B	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	173.950.690	8 Dokumen	182.648.225
C	Koordinasi Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	21.900.000	1 Aplikasi	22.995.000
D	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21 Perangkat Daerah	125.419.660	21 Perangkat Daerah	131.690.643
E	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	1.155.690.000	2 Dokumen	1.213.474.500
F	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	2 Program	81.761.400	2 Program	85.849.470
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			TAPIN	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,63 Poin	552.199.700	2,65 Poin	579.809.685
				TAPIN	Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	52%		54%	
				TAPIN	Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	52%		54%	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase perangkat daerah yang telah mendapat bimtek/desk statistik sektoral	64%	552.199.700	73%	579.809.685
				TAPIN	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	100%		100%	
				TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang di Monev Statistik Sektoral	100%		100%	
A	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	338.826.600	100 Orang	355.767.930
B	Peningkatan Kualitas Data Statistik	ASN dan	ASN dan	Kabupaten	Persentase kegiatan statistik sektoral yang	100%	0	100%	0

	Sektoral	Masyarakat	Masyarakat	Tapin	rilis tepat waktu				
C	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Kabupaten Tapin	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	9 Dokumen	213.373.100	9 Dokumen	224.041.755
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN								
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			TAPIN	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	66%	364.799.700	68%	383.039.685
				TAPIN	Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	47%		60%	
				TAPIN	Jumlah Kegiatan Computer Security Icident Response Team (CSIRT)	92%		94%	
				TAPIN	Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	20%		40%	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase SDM yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan	92%	269.158.200	94%	282.616.110
				TAPIN	Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	88%		91%	
				TAPIN	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	43%		57%	
A	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7 Laporan	163.045.200	7 Laporan	171.197.460
B	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	106.113.000	54 Perangkat Daerah	111.418.650
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			TAPIN	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	92%	95.641.500	94%	100.423.575
A	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	ASN	ASN	Kabupaten Tapin	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	95.641.500	1 Perangkat Daerah	100.423.575
JUMLAH						**11.433.206.525**			**12.004.866.851**

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Tahun 2025 telah disusun berdasarkan RPJMD dan Renstra 2025-2029 yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah untuk memecahkan permasalahan/isu-isu strategis yang termuat dalam visi dan misi Bupati terpilih serta Asta Cita Presiden periode 2025-2029. Mengacu pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin melakukan beberapa penyesuaian anggaran.

Adapun Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Perubahan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan TA 2025
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin

No	Sebelum Perubahan				Sesudah Perubahan				Bertambah/ Berkurang	Ket
	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja Kuantitatif	Anggaran		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	81 Poin	11.442.956.523	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP	81 Poin	5.411.129.599	- 6.031.826.924	
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %			Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100 %			
		Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100 %			Persentase ASN dengan Capaian Kinerja >90%	100 %			
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 %			Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100 %			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	18.600.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100 %	18.320.000	-280.000	
		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %			Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100 %			
		Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti	100 %			
A	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	6.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8.000.000	2.000.000	
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	10 Laporan	12.600.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	4 Laporan	10.320.000	-2.280.000	

		SKPD				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan	100 %	3.143.123.089	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggung Jawaban yang sesuai dengan standar penata usahaan keuangan	100 %	3.998.236.103	855.113.014	
		Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar	100 %			Persentase Laporan Keuangan yang Disampaikan Tepat Waktu dan Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100 %			
A	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/Bulan	3.137.123.089	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	348 Orang	3.992.236.103	855.113.014	
B	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	3.000.000	0	
C	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	3.000.000	0	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	54 %	1.911.414.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	54 %	767.423.200	- 1.143.991.700	
A	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	12 Paket	52.635.800	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Paket	42.200.200	-10.435.600	

		Disediakan				yang Disediakan				
B	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	291.631.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	345.403.500	53.772.500	
C	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	50.010.100	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	56.404.000	6.393.900	
D	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	18.960.000	-1.039.500	
E	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.497.138.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	304.455.000	-1.192.683.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	0 %	4.932.797.350	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	0 %	0	-4.932.797.350	
A	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	4.932.797.350	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0	-4.932.797.350	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pegawai terhadap pelayanan Sekretariat	100 %	616.229.164	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik	100 %	506.530.576	-109.698.588	
A	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	371.051.724	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	265.641.576	-105.410.148	
B	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	245.177.440	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	240.889.000	-4.288.440	

6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100 %	820.792.020	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik	100 %	120.619.720	-700.172.300	
A	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	80.170.450	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	52.781.560	-27.388.890	
B	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	25.131.030	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2 Unit	21.895.500	-3.235.530	
C	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	715.490.540	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 Unit	45.942.660	-669.547.880	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
II	PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial	75 %	2.336.850.020	PROGAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	92 %	1.850.126.600	-486.647.520	
		Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	79 %							
		Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	90 %			Persentase peningkatan jasa publikasi daerah	80 %			
		Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	95 %			Persentase ketersediaan data informasi publik yang di sediakan	96 %			
		Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi	93 %			Persentase aduan masyarakat yang	92 %			

		sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional				ditindaklanjuti pada Aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor)				
		Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	95 %							
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah konten yang ditayangkan	100%	2.336.850.020	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah jam tayang	92 %	1.850.126.600	-486.647.520	
		Persentase jumlah jam tayang	92 %							
		Persentase MoU yang diterbitkan	100%			Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina	56 %			
		Persentase PPID pelaksana aktif	97%			Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	88%			
		Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya	85%							
		Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)	88%			Persentase Pejabat Penghubung yang mendapatkan Monev Aplikasi SP4N Lapor	91 %			
		Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan	95%							

		pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)								
A	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	1.451.419.200	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif dalam kegiatan relasi media	5 Laporan	1.406.525.000	-44.894.200	
B	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	10 Komunitas	24.684.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas	5.390.000	-19.294.000	
C	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	4 Permohonan	148.879.980	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan	117.552.400	-31.327.580	
D	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	265.308.230	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	4 Rekomendasi	37.278.200	-228.030.030	
E	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	4 Media	434.334.710	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis	4 Media	275.626.000	-158.708.710	
F	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	4 Orang	12.223.900	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan	4 Orang	7.755.000	-4.468.900	
III	PROGRAM APLIKASI	Persentase Perangkat	39%	8.726.079.813	PROGRAM APLIKASI	Persentase Perangkat	78%	3.254.950.926	-	

	INFORMATIKA	Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo			INFORMATIKA	Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo			5.471.128.887	
		Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi	93%			Persentase Aplikasi yang sudah terintegrasi	80%			
		Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	66%			Persentase desa / kelurahan bebas low spot (sinyal lemah)	57%			
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi	61%	1.332.287.426	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	71%	1.304.944.776	-27.342.650	
		Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi	93%							
		Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website	73%							
		Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website	73%							
A	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	95 Dokumen	1.332.287.426	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	4 Dokumen	1.304.944.776	-27.342.650	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	78%	7.393.792.387	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps	72 %	1.950.006.150	-5.443.786.237	
		Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	78%			Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat	43 %			
		Persentase wifi publik yang sudah terbangun	78%							
		Persentase server sesuai standar	80%			Persentase server sesuai standar	71 %			

		Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi	78%							
		Persentase server yang mampu mengelola database	83%							
A	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	15 Laporan	475.354.400	Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	3 Laporan	391.284.400	-84.070.000	
B	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	4 Dokumen	387.254.940	Koordinasi Pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	8 Dokumen	173.950.690	-213.304.250	
C	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	95 Aplikasi	478.210.466	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang Sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rancangan SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	1 Aplikasi	21.900.000	-456.310.466	
D	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21 Perangkat Daerah	2.355.685.381	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	21 Perangkat Daerah	125.419.660	-2.230.265.721	
E	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	54 Dokumen	2.518.850.300	Fasilitasi Penyelenggaraan Audit TIK Sesuai Kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	2 Dokumen	1.155.690.000	-1.363.160.300	
F	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	7 Program	1.178.436.900	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/ Kota Cerdas	2 Program	81.761.400	-1.096.675.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					

IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,62 Poin	719.970.630	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks pembangunan Statistik (IPS)	2,63 Poin	552.199.700	-167.770.930	
		Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	95%			Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi	52%			
		Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	95%			Persentase data statistik sektoral yang disediakan tepat waktu	52%			
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral	95%	719.970.630	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	100%	552.199.700	-167.770.930	
		Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral	95%							
		Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik	80%			Persentase perangkat daerah yang telah mendapat bimtek/desk statistik sektoral	64%			
		Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral	1 Dokumen							
		Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data	95%			Persentase Perangkat Daerah yang di Monev Statistik Sektoral	100%			
		Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi	100%							
		Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah	78%							
A	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	17 Orang	225.577.910	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	100 Orang	338.826.600	113.248.690	
B	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	15.000.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	100%	0	-15.000.000	
C	Penyelenggaraan	Jumlah kegiatan statistik	4 Dokumen	479.392.720	Penyelenggaraan Statistik	Jumlah kegiatan statistik	9 Dokumen	213.373.100	-266.019.620	

	Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	sektoral yang telah dilengkapi metadata			Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	sektoral yang telah dilengkapi metadata				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	75%	492.825.902	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkatnya Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	66%	364.799.700	-128.026.202	
		Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI	100%			Persentase SDM yang memiliki sertifikat keamanan informasi	47%			
		Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi	58%			Jumlah Kegiatan Computer Security Icident Response Team (CSIRT)	92%			
						Persentase titik Pelaksanaan Pola Hubungan Komunikasi Sandi PHKS yang teramankan	20%			
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi	80%	484.063.902	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	43%	269.158.200	-214.905.702	
		Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan	75%							
		Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan	75%							
		Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	67%			Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade	88%			
		Persentase sandiman yang	100%			Persentase SDM yang	92%			

		tersertifikasi				menggunakan Tanda Tangan Elektronik Sesuai Permohonan				
		Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi	100%							
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik	55%							
		Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan	100%							
		Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik	100%							
A	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	4 Laporan	256.883.002	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	7 Laporan	163.045.200	-93.837.802	
B	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	227.180.900	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	54 Perangkat Daerah	106.113.000	-121.067.900	
2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase titik PHKS yang teramankan	67%	8.762.000	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan Tata Kelola Pengamanan Informasi pada website SANAPATI	92%	95.641.500	86.879.500	
		Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun	100%							
A	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	21 Perangkat Daerah	8.762.000	Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	1 Perangkat Daerah	95.641.500	86.879.500	
		JUMLAH		**23.718.682.888**		**JUMLAH**		**11.433.206.525**	**-12.285.476.363**	

Sumber :Dinas Kominfo Kabupaten Tapin Tahun 2025

BAB V
PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin 2025, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin mempunyai acuan arah pembangunan dalam menyikapi perkembangan dan dinamika yang terus berubah dengan cepat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah, penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika ini merupakan bagian dalam melakukan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Oleh karena itu efisiensi dan efektifitas implementasi Perubahan Renja sangat memerlukan dukungan dari pemerintah kabupaten, stakeholders dan dukungan seluruh komponen organisasi.

Tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin akan mudah dicapai dengan dukungan penuh dan upaya maksimal dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan faktor-faktor :

- Kepedulian yang tinggi dari semua jajaran aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dapat memberikan konstribusi terhadap keberhasilan organisasi secara menyeluruh.
- Peka terhadap perubahan dan perkembangan global yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi
- Tim-tim kerja yang ada dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memadukan segala keahlian dan kelebihan personal yang dimiliki secara bersama-sama untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan dapat memecahkan masalah lintas fungsional di dalam organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan dari apa yang disajikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan saran dan usulan yang dapat menyempurnakan Perubahan Rencana kerja ini, agar dapat mendukung pencapaian tujuan daerah Tahun 2025-2029, yaitu: “**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Inovatif Dan Berintegritas**” dapat tercapai dengan tepat sasaran dan tepat waktu.

BUPATI TAPIN,

YAMANI

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KAB. TAPIN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**23.718.682.888,00**	**11.697.581.525,00**	**11.433.206.525,00**	**-12.285.476.363,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**							**23.718.682.888,00**	**11.697.581.525,00**	**11.433.206.525,00**	**-12.285.476.363,00**							**0,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**22.505.886.356,00**	**10.767.982.125,00**	**10.516.207.125,00**	**-11.989.679.231,00**							**0,00**	
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase ASN dengan capaian kinerja >90% Nilai Komponen AKIP**				**-**	**100 80 % Poin**	**11.442.956.523,00**	**5.538.928.699,00**	**5.411.129.599,00**	**-11.442.956.523,00**							**0,00**	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklajuti Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang*				-	100 %	18.600.000,00	18.320.000,00	18.320.000,00	-280.000,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	6.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10 Laporan	10 Laporan	12.600.000,00	10.320.000,00	10.320.000,00	-2.280.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	3.143.123.089,00	3.902.225.643,00	3.998.236.103,00	855.113.014,00			-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				288 Orang/ bulan	288 Orang/ bulan	3.137.123.089,00	3.896.225.643,00	3.992.236.103,00	855.113.014,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	1.911.414.900,00	1.008.617.900,00	767.423.200,00	-1.143.991.700,00			-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	52.635.800,00	35.271.100,00	42.200.200,00	-10.435.600,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	291.631.000,00	322.875.800,00	345.403.500,00	53.772.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	12 Paket	50.010.100,00	56.404.000,00	56.404.000,00	6.393.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	15.250.000,00	18.960.500,00	-1.039.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.497.138.000,00	578.817.000,00	304.455.000,00	-1.192.683.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	4.932.797.350,00	0,00	0,00	-4.932.797.350,00			-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	4.932.797.350,00	0,00	0,00	-4.932.797.350,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik*				-	100 %	616.229.164,00	500.209.216,00	506.530.576,00	-109.698.588,00			-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	371.051.724,00	250.009.176,00	265.641.576,00	-105.410.148,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	245.177.440,00	250.200.040,00	240.889.000,00	-4.288.440,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dengan Baik Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik*				-	100 %	820.792.020,00	109.555.940,00	120.619.720,00	-700.172.300,00			-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				3 Unit	3 Unit	80.170.450,00	52.781.560,00	52.781.560,00	-27.388.890,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	3 Unit	25.131.030,00	17.916.400,00	21.895.500,00	-3.235.530,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	715.490.540,00	38.857.980,00	45.942.660,00	-669.547.880,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Rasio sentimen publik terhadap kabupaten Tapin di media sosial Persentase kelompok informasi masyarakat (KIM) yang dibina Persentase peningkatan jasa publikasi daerah Persentase aduan masyarakat melalui aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor) yang sesuai dengan target standar nasional Persentase aduan masyarakat terverifikasi yang respons time untuk ditindak lanjuti pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)**				**-**	**75 79 90 93 95 % % % % %**	**2.336.850.020,00**	**1.850.202.500,00**	**1.850.126.600,00**	**-2.336.850.020,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase admin PPID yang ditingkatkan kapasitasnya* *Persentase jumlah jam tayang* *Persentase jumlah konten yang ditayangkan* *Persentase masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi dan publikasi aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)* *Persentase MoU yang diterbitkan* *Persentase PPID pelaksana aktif* *Persentase verifikasi yang respons time terhadap aduan masyarakat pada aplikasi sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional layanan aspirasi pengaduan online rakyat (SP4N Lapor)*				-	10 % 100 % 85 % 88 % 92 % 95 % 97 %	2.336.850.020,00	1.850.202.500,00	1.850.126.600,00	-486.723.420,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media																		
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				6 Laporan	6 Laporan	1.451.419.200,00	1.466.537.500,00	1.406.525.000,00	-44.894.200,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat																		
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				10 Komunitas	10 Komunitas	24.684.000,00	5.425.000,00	5.390.000,00	-19.294.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik																		
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				4 Permohonan	4 Permohonan	148.879.980,00	58.130.800,00	117.552.400,00	-31.327.580,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik																		
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				4 Rekomendasi	4 Rekomendasi	265.308.230,00	37.308.200,00	37.278.200,00	-228.030.030,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik																		
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	4 Media	434.334.710,00	275.626.000,00	275.626.000,00	-158.708.710,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik																		
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				4 Orang	4 Orang	12.223.900,00	7.175.000,00	7.755.000,00	-4.468.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
3.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan intra yang dikelola oleh Diskominfo Persentase desa bebas low spot (sinyal lemah) Persentase Pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan teritegrasi**				**-**	**39 66 93 % % %**	**8.726.079.813,00**	**3.378.850.926,00**	**3.254.950.926,00**	**-8.726.079.813,00**							**0,00**	
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase aplikasi yang sudah terintegrasi Persentase desa / kelurahan yang terbangun sarana telekomunikasi Persentase perangkat daerah yang aktif mengelola website Persentase perangkat daerah yang update pengelolaan website*				-	61 % 73 % 93 %	1.332.287.426,00	1.318.444.776,00	1.304.944.776,00	-27.342.650,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa																		
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				95 Dokumen	95 Dokumen	1.332.287.426,00	1.318.444.776,00	1.304.944.776,00	-27.342.650,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase kualitas akses internet dengan kecepatan rata-rata 50 Mbps Persentase perangkat daerah yang menindak lanjuti rekomendasi Persentase server sesuai standar Persentase server yang mampu mengelola database Persentase wifi publik yang disediakan untuk masyarakat Persentase wifi publik yang sudah terbangun*				-	78 % 80 % 83 %	7.393.792.387,00	2.060.406.150,00	1.950.006.150,00	-5.443.786.237,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda																		
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda				15 Laporan	15 Laporan	475.354.400,00	439.284.400,00	391.284.400,00	-84.070.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE																		
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				4 Dokumen	4 Dokumen	387.254.940,00	221.950.690,00	173.950.690,00	-213.304.250,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah																		
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah				95 Aplikasi	95 Aplikasi	478.210.466,00	21.900.000,00	21.900.000,00	-456.310.466,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota																		
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	2.355.685.381,00	125.419.660,00	125.419.660,00	-2.230.265.721,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo				54 Dokumen	54 Dokumen	2.518.850.300,00	1.170.090.000,00	1.155.690.000,00	-1.363.160.300,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas																		
			Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas				7 Program	7 Program	1.178.436.900,00	81.761.400,00	81.761.400,00	-1.096.675.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**719.970.630,00**	**564.799.700,00**	**552.199.700,00**	**-167.770.930,00**							**0,00**	
1.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Indeks pembangunan Statistik (IPS) Persentase data statistik sektoral yang terintegrasi**				**-**	**2.62 95 Poin %**	**719.970.630,00**	**564.799.700,00**	**552.199.700,00**	**-719.970.630,00**							**0,00**	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Aplikasi untuk pengelolaan data statistik sektoral Jumlah dokumen proses bisnis statistik sektoral Persentase MoU yang diterbitkan dari produsen data Persentase perangkat daerah yang mendapat pelatihan statistik sektoral dan sertifikasi statistisi Persentase perangkat daerah yang mengumpulkan data sektoral Persentase peserta sosialisasi yang memahami Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) kepada perangkat daerah Persentase produsen data yang memahami proses bisnis Statistik Sektoral Persentase SDM pemerintah daerah yang memiliki sertifikat statistik*				-	0 Aplikasi 100 % 1 Dokumen 78 % 80 % 95 %	719.970.630,00	564.799.700,00	552.199.700,00	-167.770.930,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral																		
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				17 Orang	17 Orang	225.577.910,00	338.826.600,00	338.826.600,00	113.248.690,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral																		
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00	0,00	0,00	-15.000.000,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia																		
			Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				4 Dokumen	4 Dokumen	479.392.720,00	225.973.100,00	213.373.100,00	-266.019.620,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**492.825.902,00**	**364.799.700,00**	**364.799.700,00**	**-128.026.202,00**							**0,00**	
1.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola pengamanan informasi pada website SANAPATI Persentase perangkat daerah yang melakukan monitoring Teknologi dan keamanan informasi Indeks Keamanan Informasi (KAMI)**				**-**	**100 75 750 % % %**	**492.825.902,00**	**364.799.700,00**	**364.799.700,00**	**-492.825.902,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan pengguna tanda tangan elektronik* *Persentase perangkat daerah yang melakukan Pengelolaan aset informasi sesuai dengan peraturan* *Persentase perangkat daerah yang melakukan tata kelola resiko keamanan informasi* *Persentase perangkat daerah yang menggunakan tanda tangan elektronik* *Persentase peserta yang mendapatkan nilai diatas passing grade* *Persentase sandiman yang lulus ujian sertifikasi* *Persentase sandiman yang tersertifikasi* *Persentase SK tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) yang terbentuk sesuai dengan peraturan* *Persentase SOP Kerangka kerja keamanan informasi yang dibuat sesuai dengan peraturan*				-	100 % 55 % 67 % 75 % 80 %	484.063.902,00	269.158.200,00	269.158.200,00	-214.905.702,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik																		
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				4 Laporan	4 Laporan	256.883.002,00	163.045.200,00	163.045.200,00	-93.837.802,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi				54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	227.180.900,00	106.113.000,00	106.113.000,00	-121.067.900,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Peraturan bupati tentang PHKS yang tersusun* *Persentase titik PHKS yang teramankan*				-	100 % 67 %	8.762.000,00	95.641.500,00	95.641.500,00	86.879.500,00			Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi				21 Perangkat Daerah	21 Perangkat Daerah	8.762.000,00	95.641.500,00	95.641.500,00	86.879.500,00	Kab. Tapin, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur			0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	J U M L A H								**23.718.682.888,00**	**11.697.581.525,00**	**11.433.206.525,00**	**-22.858.632.991,00**							**0,00**	

IDENTIFIKASI DAN ANALISA RISIKO KECURANGAN

Instansi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Instansi	No	Tahapan Proses Bisnis	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecurangan	Pihak Terkait	Jenis Risiko Kecurangan	Pemilik Risiko	Penyebab	Indikator Risiko/Gejala/Red Flag	Pengendalian Terpasang	Risiko Saat Ini (current risk)			Respon Terhadap Risiko Kecurangan
											Kemungkinan	Dampak	Status Risiko (Nilai)	
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	Tahapan Perencanaan	Manipulasi HPS Pengadaan Jaringan Fiber Optic dengan penetapan spesifikasi yang mengarah pada penyedia tertentu	Manipulasi HPS dilakukan dengan cara menetapkan spesifikasi yang terlalu spesifik atau mengarah pada penyedia tertentu dengan tujuan memenangkan vendor tertentu.	1. Panitia Pengadaan 2. Penyedia Barang/Jasa 3. Diskominfo	Penggelapan dalam Jabatan	1. PA/PPK 2. Penyedia	Kolusi antara panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa serta kurangnya transparansi dalam proses penyusunan HPS dan spesifikasi	Spesifikasi sangat spesifik atau terlalu rinci yaitu dengan menyebutkan merek atau model tertentu serta minimnya jumlah penyedia yang berpartisipasi / sedikit sehingga hanya satu penyedia yang dapat memenuhi spesifikasi	Proses penyusunan HPS yang transparan dengan melibatkan tim independen serta menggunakan standar spesifikasi teknis yang mengacu pada regulasi atau panduan teknis yang baku	4	4	16	Meningkatkan Transparansi dengan memastikan seluruh proses penyusunan HPS dan spesifikasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan
	2	Tahapan Perencanaan	Mark Up Pengadaan Server	Mark-up terjadi dalam pengadaan server dengan cara menggelembungkan harga dalam dokumen HPS atau kontrak. Harga yang ditetapkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar, sehingga memungkinkan keuntungan tidak sah bagi pihak tertentu	1. Panitia Pengadaan 2. Penyedia Barang/Jasa 3. Diskominfo	Perbuatan Merugikan Negara	1. PA/PPK 2. Penyedia	Kurangnya transparansi dalam penyusunan HPS sehingga harga tidak berdasarkan referensi pasar yang valid serta tidak melibatkan ahli teknis dalam penyusunan HPS yang memahami spesifikasi dan harga server serta kurangnya integritas pegawai	Harga server dalam HPS jauh di atas harga pasar karena tidak ada pembanding harga yang wajar serta ketidaksesuaian spesifikasi yaitu server yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam dokumen pengadaan, tetapi pembayaran tetap dilakukan	Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses penyusunan HPS harus mengikuti panduan dan melibatkan data pasar terkini serta konsultasi dengan ahli di bidang IT untuk menentukan spesifikasi teknis dan harga pasar yang sesuai	4	4	16	Melakukan verifikasi dan survey harga yaitu dengan membandingkan harga server dengan data pasar terkini, baik melalui vendor resmi maupun katalog elektronik (e-catalog)
	3	Tahap Pelaksanaan	Manipulasi jumlah peserta rapat, sosialisasi dan bimtek	Jumlah peserta rapat, sosialisasi dan bimtek dimanipulasi yang seharusnya peserta hanya 70 orang dijadikan 90 orang dengan memanipulasi jumlah peserta dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi	1. Peserta 2. Panitia Kegiatan	Perbuatan Curang	1. Panitia 2. PPTK 3. Kadis	Tidak adanya pengawasan dan tidak adanya SOP dalam mengadakan kegiatan rapat, sosialisasi dan bimtek	Ketidaksesuaian antara data kehadiran dan dokumentasi yaitu jumlah peserta yang tercantum dalam daftar hadir tidak sesuai dengan dokumentasi berupa foto atau bukti lain dari kegiatan tersebut serta tulisan di presensi identik sama.	Sistem absensi elektronik yaitu dengan menggunakan absensi QR code atau aplikasi digital yang mencatat waktu dan lokasi kehadiran peserta secara otomatis.	3	3	9	Verifikasi data kehadiran dengan melakukan pencocokan antara daftar hadir, dokumentasi foto dan laporan kegiatan serta menggunakan sistem absensi elektronik untuk mencegah manipulasi tanda tangan.

	4	Tahap Pelaksanaan	Penyalahgunaan BMD	Penyalahgunaan fasilitas kantor berupa mobil atau motor dinas untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi kedinasan digunakan oleh pegawai untuk kepentingan pribadi misalnya perjalanan keluarga	PNS	Benturan Kepentingan	1. Pengurus Barang 2. Kadis	Kurangnya pengawasan yaitu tidak ada sistem pemantauan penggunaan kendaraan dinas serta budaya kerja yang tidak disiplin yaitu adanya persepsi bahwa penyalahgunaan fasilitas adalah hal biasa.	Kendaraan dinas ditemukan di lokasi yang dalam urusan dinas tetapi terlihat di tempat yang tidak berkaitan dengan tugas misalnya seperti pusat perbelanjaan atau tempat wisata pada hari libur atau di luar jam kerja.	Membuat aturan penggunaan yang ketat yaitu dengan membuat peraturan tertulis yang jelas mengenai larangan penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi.	3	3	9	Pemberian sanksi yang tegas berupa sanksi administratif atau denda bagi pegawai yang terbukti menyalahgunakan kendaraan dinas serta menggunakan teknologi seperti GPS untuk memonitor lokasi kendaraan.

Rabu, 29 Juli 2025
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Tapin

Wahyudi Pranoto, S.Sos, MT
NIP. 19710130 199903 1 005